



**Jakarta**  
Sukses Jakarta untuk Indonesia!

**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA  
LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN  
2023**

JL. GATOT SUBROTO KAV. 40-41  
KUNINGAN, KOTA JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12950

# KATA PENGANTAR

---

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia Nya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. LKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Purwosusilo

NIP 196707241997031005

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini melaporkan tingkat pencapaian strategis dan indikator kinerja utama tahun 2023 yang dikaitkan dengan Rencana Strategis dan RPJMD tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki 30 Indikator Kinerja yang diperjanjikan, Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,09	13,33	101,83%	Tercapai
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,33	11,45	101,06%	Tercapai
<b>Sasaran Strategis</b>						
3	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	100	100	100%	Tercapai
4	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Persen	100	100	100%	Tercapai
5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persen	100	100	100%	Tercapai
6	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan	Persen	100	100	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi					
7	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	Persen	100	100	100%	Tercapai
8	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan Pendidikan	Persen	100	100	100%	Tercapai
9	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	100	100	100%	Tercapai
<b>Sasaran Khusus</b>						
10	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	Persen	100	101,19	101,19%	Tercapai
11	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik dan EMIS	Persen	98,06	98,76	100,71%	Tercapai
12	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	Persen	33	76,30	231,21%	Tercapai
13	Persentase Keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha	Persen	65	83,07	127,8%	Tercapai
14	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Hari	20	20	100%	Tercapai
15	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	100	100%	Tercapai
16	Opini laporan keuangan	Persen	3 (WTP)	3 (WTP)	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
17	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persen	100	100	100%	Tercapai
18	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Persen	82	83,55	101,89%	Tercapai
19	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persen	100	100	100%	Tercapai
20	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persen	100	100	100%	Tercapai
21	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persen	100	91,78	91,78%	Tidak Tercapai
22	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	72	90%	Tidak Tercapai
23	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	91,78	91,78%	Tidak Tercapai
24	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100%	Tercapai
25	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%	Tercapai
26	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	77,34	108,93%	Tercapai
<b>Sasaran Operasional</b>						

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
27	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%	Tercapai
28	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,05	99,05%	Tidak Tercapai
29	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	88,5	86,76	98,03%	Tidak Tercapai
30	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%	Tercapai

Berdasarkan Perjanjian kinerja dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) terdiri dari 2 indikator kinerja utama, 7 indikator sasaran strategis, 17 indikator sasaran khusus, dan 4 indikator sasaran operasional. Dari 30 indikator terdapat 25 indikator tercapai dan 5 indikator tidak tercapai. Adapun 5 indikator yang tidak tercapai terdapat pada 3 indikator sasaran khusus dan 2 indikator sasaran operasional.

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT .....	1
C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH .....	4
D. TUGAS DAN FUNGSI .....	5
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
F. STRATEGIS YANG DIHADAPI .....	10
G. SUMBER DAYA MANUSIA .....	13
H. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	13
BAB II .....	15
PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023 .....	15
C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPD .....	33
BAB III .....	34
AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
A. CAPAIAN KINERJA.....	34
1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama .....	34
2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja .....	37
B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA .....	53
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	53

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	54
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. ....	56
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.	58
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. ....	59
C. REALISASI ANGGARAN .....	62
1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta .....	62
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program.....	63
3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja.....	63
BAB IV.....	65
PENUTUP .....	65
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

### B. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan utama pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima;
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan;
4. Terwujudnya ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses

- pembelajaran dan pembinaan peserta didik berkarakter mulia, mandiri, cerdas dan peduli lingkungan;
5. Menjadikan setiap pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu dengan mewajibkan mereka mengikuti diklat yang diselenggarakan secara rutin bagi setiap pendidik dan para tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan di Jakarta;
  6. Memperkuat peran dan tanggungjawab P4 sebagai pusat pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dan profesional bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Jakarta, sehingga mereka mampu menjadi *the real educator, motivator dan inspirator* yang berkualitas dan berkarakter mulia, dimana kepentingan dan masa depan peserta didik yang cemerlang menjadi orientasi setiap pembelajaran di satuan pendidikan;
  7. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan;
  8. Mempertahankan ketuntasan APK dan meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar;
  9. Meningkatkan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah;
  10. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di pulau seribu;
  11. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;
  12. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional;
  13. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar satuan pendidikan;
  14. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
  15. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai wadah

- kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;
16. Meningkatnya kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik serta mewujudkan ekosistem sekolah yang mumpuni dan berintegritas sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja dan berdedikasi tinggi;
  17. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis meritokrasi yang ketat, transparan, dan akuntabel;
  18. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
  19. Berjalanya sistem *e-catalogue* yang meliputi semua pengadaan barang dan jasa Dinas pendidikan DKI Jakarta;
  20. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
  21. Terwujudnya pola kepemimpinan satuan pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif;
  22. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiah, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan publik;
  23. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus menumbuh suburkan *life skill*, *work skill* dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan peserta didik.

Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dalam rencana strategis dapat digambarkan dalam tabel berikut:

TABEL 1.1. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun			
			2023	2024	2025	2026
Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,09	13,11	13,13	13,15
	Terjaminnya Akses dan Layanan Serta	Rata-rata Lama Sekolah	11,19	11,21	11,23	11,25

Sepanjang Hayat	Perbaikan Tata Kelola Pendidikan					
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

TABEL 1.2. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
		Persentase guru professional
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### C. KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan;
2. Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan;
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas; dan
7. Dinas Pendidikan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

## D. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas :

### 1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

***“Menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.”***

### 2. Fungsi

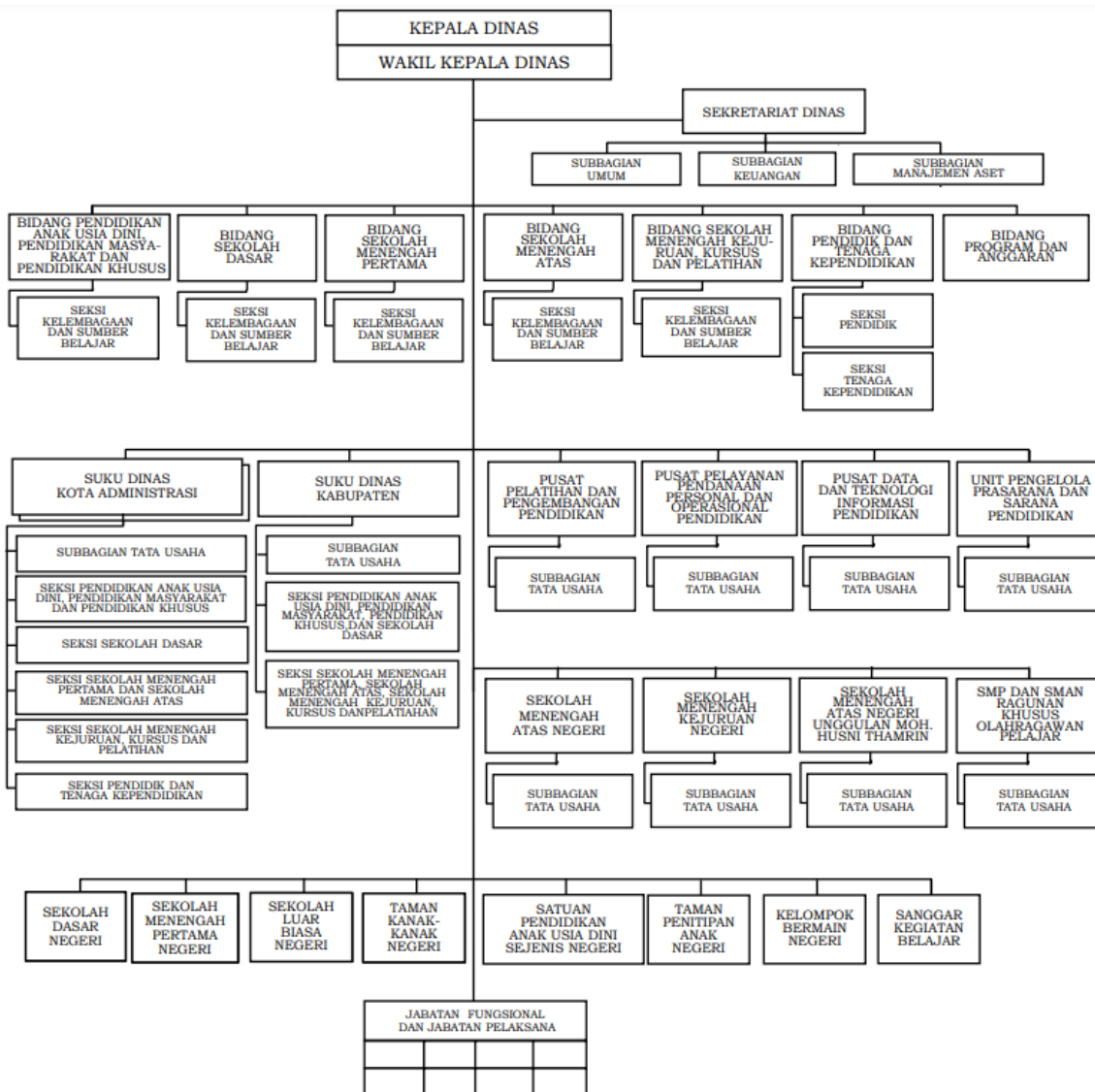
Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pendidikan;
- d. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- h. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang pendidikan;
- i. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan pendidikan;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan;

- k. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
- n. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja pendidikan;
- o. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- p. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tersebut berikut Struktur Organisasi SKPD-Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Manajemen Aset,
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
5. Bidang Sekolah Dasar, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;

6. Bidang Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
7. Bidang Sekolah Menengah Atas, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
8. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
9. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pendidik;
  - b. Seksi Tenaga Kependidikan,
10. Bidang Program dan Anggaran;
11. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus;
  - c. Seksi Sekolah Dasar;
  - d. Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
  - e. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan;
  - f. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
12. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar;
  - c. Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan,
13. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
14. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
15. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
16. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri, terdiri atas:
  - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;

- b. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;
  - c. Taman Penitipan Anak Negeri;
  - d. Kelompok Bermain Negeri;
18. Sekolah Dasar Negeri;
  19. Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  20. Sekolah Menengah Atas Negeri, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  21. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  22. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Moh. Husni Thamrin, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  23. Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  24. Sekolah Luar Biasa Negeri;
  25. Sanggar Kegiatan Belajar.

Selain itu, Pada Dinas Pendidikan dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:

- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
- b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota pada Suku Dinas Pendidikan Kota;
- c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Pelaksana Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.

### **GAMBARAN UMUM JUMLAH SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SERTA AKREDITASI SEKOLAH TAHUN 2023**

TABEL 1.3. DATA JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO	JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	PAUD	167	3.939	4.106
2	SD	1.305	931	2.236
3	SMP	293	782	1.075
4	SMA	117	382	499
5	SMK	73	492	565
6	SLB	13	76	89
7	SKB/PKBM	39	256	298
	<b>Jumlah</b>	<b>2.007</b>	<b>6.861</b>	<b>8.868</b>
	<b>Persentase</b>	<b>22,63%</b>	<b>77,37%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dapodik 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah satuan pendidikan sebanyak 8.868 dimana satuan pendidikan negeri sebanyak 2.007 atau 22,63% dan satuan pendidikan swasta sebanyak 6.861 atau 77,37%. Dari jumlah 8.868 satuan pendidikan terdiri dari 4.106 jenjang PAUD; 2.236 jenjang SD; 1.075 jenjang SMP, 499 jenjang SMA, 565 jenjang SMK, 89 jenjang SLB dan 298 jenjang SKB/PKBM.

TABEL 1.4. DATA SATUAN PENDIDIKAN AKREDITASI TAHUN 2023

Akreditasi	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	PKBM	Jumlah
A	403	1.764	712	378	279	38	67	3.641
B	859	388	322	100	256	40	82	2.047
C	445	28	16	5	26	9	27	556
Terakreditasi	32	-	-	-	-	-	3	35
<b>Total Terakreditasi</b>	<b>1.739</b> (42,35%)	<b>2.180</b> (97,50%)	<b>1.050</b> (97,67%)	<b>483</b> (96,79%)	<b>561</b> (99,29%)	<b>87</b> (97,75%)	<b>179</b> (60,70%)	<b>6.279</b> (70,81%)
TdkTerakreditasi	11	7	4	2	-	1	4	29
Belum Akreditasi	2.356	45	20	14	4	1	115	2.555
Kedaluwarsa	-	4	1	-	-	-	-	5
<b>Total Tidak/Belum Terakreditasi</b>	<b>2.367</b> (57,65%)	<b>56</b> (2,50%)	<b>25</b> (2,33%)	<b>16</b> (3,21%)	<b>4</b> (0,71%)	<b>2</b> (2,25%)	<b>119</b> (39,93%)	<b>2.589</b> (29,19%)
<b>Total Satuan Pendidikan</b>	<b>4.106</b>	<b>2.236</b>	<b>1.075</b>	<b>499</b>	<b>565</b>	<b>89</b>	<b>298</b>	<b>8.868</b>

Sumber: Dapodik 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah satuan pendidikan yang telah terakreditasi pada tahun 2023 sebanyak sebanyak 6.279 atau 70,81% sedangkan yang tidak/belum terakreditasi sebanyak 2.589 atau 29,19%.

## F. STRATEGIS YANG DIHADAPI

Dinas Pendidikan telah merumuskan 4 poin besar yang menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di DKI Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya DKI Jakarta pada tahun 2024 statusnya tidak lagi sebagai ibukota Negara, transformasi yang dilakukan adalah DKI Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis berskala global. Oleh karena itu Dinas Pendidikan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pendidikan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mewujudkan ide tersebut. Adapun keempat isu strategis yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan: masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang, PAUD, menengah dan khusus
2. Masih rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik pada asesmen nasional

3. Belum semua Pendidik dan Tenaga Pendidik dikategorikan sebagai Pendidik dan Tendik Profesional
4. Masih rendahnya penyerapan lulusan SMK baik di DU/DI, berwirausaha, dan yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.
5. Masih terdapat anak-anak yang memiliki gizi buruk di DKI Jakarta
6. Cukup tingginya anak-anak yang mengalami kondisi depresi

Pada dasarnya kondisi pendidikan di DKI Jakarta sudah cukup baik namun di beberapa jenjang pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Pada jenjang pendidikan PAUD di DKI Jakarta masih cukup rendah, padahal pendidikan PAUD memiliki peranan yang penting bagi perkembangan tumbuh kembang anak. Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberikan pada jenjang PAUD akan berdampak positif pada perkembangan sosial, emosi, kognitif, bahasa, dan moral seorang anak. Anak yang memperoleh stimulasi sejak dini akan memiliki prestasi akademis yang cenderung lebih baik pada masa mendatang. Untuk itu Dinas Pendidikan memberikan perhatian khusus pada angka partisipasi jenjang PAUD, karena masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses ke PAUD.

Pada jenjang pendidikan menengah khususnya SMA/SMKA dan MA angka partisipasi murni pada tahun 2021 masih cukup rendah. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena banyak anak lulusan SMP/MTs yang tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK, dan MA. Pemerintah sudah menetapkan wajib belajar 12 tahun sehingga memiliki konsekuensi untuk menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menyediakan pelayanan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK dan MA. Pendidikan SMK juga mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta akan berubah menjadi pusat ekonomi global. Oleh karena itu lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja DU/DI. Sehingga lulusan SMK banyak yang terserap di DU/DI sepenuhnya.

Pada jenjang pendidikan khusus masih terdapat anak-anak disabilitas yang tidak dapat mengakses pendidikan, khususnya yang berasal dari kurang mampu. Untuk sekolah-sekolah negeri masih terdapat kekurangan guru pendamping khusus dan pelatihan guru inklusi. Selain jumlah SLB negeri juga masih belum

memenuhi untuk menampung anak-anak disabilitas sehingga pembukaan sekolah baru atau ruang kelas baru menjadi isu yang prioritas bagi dinas pendidikan.

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan pendidik dan tenaga pendidik yang profesional. Pendidik dan tenaga pendidik harus bisa membaca perubahan zaman yang terjadi sehingga dalam proses pembelajaran dapat menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi bidang ilmu, kompetensi kognitif, kompetensi intrapersonal, dan kompetensi interpersonal. Selain itu tantangan bagi Pendidik saat ini dunia tengah berada pada kondisi yang diistilahkan sebagai VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*). Kondisi ini adalah dimana dunia bisnis dan sosial penuh perubahan yang sangat cepat, tidak stabil serta tidak terduga, ketidakpastian informasi karena banyaknya informasi diberbagai platform baik media sosial ataupun media konvensional, dan kompleksitasnya permasalahan karena sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Untuk itu penting bagi pendidik untuk dapat membaca situasi saat ini agar peserta didik yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dunia saat ini.

Berangkat dari sejumlah yang dilakukan oleh sejumlah lembaga nasional maupun internasional, indeks literasi numerasi peserta didik kita masih berada di peringkat yang rendah di dunia. Peringkat literasi yang masih rendah juga berimbas kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tolak ukur kualitas sumberdaya manusia (SDM) di sebuah negara. Ditilik dari skor IPM, Indonesia jug masih menempati level yang tidak menggembirakan terlebih jika dibandingkan dengan peringkat sejumlah negara jiran di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berangkat dari data dan fakta yang ada, penguatan kecakapan literasi dasar merupakan keniscayaan dan menjadi sesuatu yang tak dapat ditawar. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum pada tahun 2015 menegaskan bahwa penguasaan enam literasi dasar yaitu literasi baca tulis, numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya kewargaan menjadi salah satu kompetensi abad-21 yang diperlukan oleh semua warga dunia terutama peserta didik.

Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas selain pendidikan, juga dibutuhkan kesehatan yang baik. Data yang dikeluarkan oleh

Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting di Jakarta sebesar 16,8%. Perlu dilakukan peningkatan kualitas gizi bagi anak-anak, untuk itu dinas pendidikan membuat program PMT-AS pada jenjang PAUD dan SD.

Isu kesehatan mental menjadi perhatian serius karena DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang punya berbagai macam latar belakang dan situasi lingkungan yang beragam, yang memiliki konsekuensi variasinya masalah yang dihadapi. Hal ini tentu berpengaruh bagi kesehatan mental manusianya. Anak-anak juga tidak terlepas dari kondisi kesehatan mental yang beragam. Pengaruh dimana ia dibesarkan dan kondisi apa yang dialami memberi dampak bagi tumbuh kembang kepribadiannya. Untuk itu dinas pendidikan perlu melakukan skrining di setiap jenjang pendidikan, agar sekolah mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mental peserta didik sehingga berpengaruh terhadap bagaimana pendidik dan tenaga pendidik melakukan proses pembelajaran.

## G. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pegawai, baik yang merupakan jabatan struktural dan fungsional (guru) sebagai berikut :

TABEL 1.5. DATA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Jabatan	Data		Satuan
		Januari 2023	Desember 2023	
1	Jabatan Struktural	2.014	1.913	Orang
2	Jabatan Fungsional (Guru)	27.843	38.764	Orang
3	KKI Tenaga Kependidikan	9.344	9.311	Orang
4	KKI Pendidik	13.478	7.427	Orang
	<b>Total</b>	<b>52.679</b>	<b>57.415</b>	<b>Orang</b>

## H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Target Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023, realisasi tahun 2023 dan capaian kinerja tahun 2018-2023 sebagai tolak ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas data umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, struktur organisasi pernyataan visi, pernyataan misi, tujuan dan sasaran, isu strategis, dan sistematika penyajian laporan kinerja.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

### **Bab III – Akuntabilitas**

Menguraikan pengukuran kinerja 2023 berupa target capaian kinerja organisasi, realisasi capaian kinerja organisasi, perbandingan realisasi capaian dengan tahun sebelumnya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan perbandingan dengan target nasional, serta realisasi anggaran program yang mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan realisasi anggaran berdasarkan unit kerja.

### **Bab IV - Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

---

### A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian Kinerja organisasi.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (PK) tertuang didalam dokumen indikator Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, yang didalamnya terdapat sasaran, Indikator Kinerja dan Target.

### B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat

mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Visi Provinsi DKI Jakarta yaitu :

**Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua**

Misi Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Adapun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengampu Misi 1 yaitu:

**Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

## Mewujudkan Pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan yang tuntas, menyeluruh, cerdas secara komprehensif yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis serta berkarakter. Kompetitif dimaksudkan dalam rangka mengupayakan lulusan pendidikan untuk dapat berdaya saing global dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dapat bekerja di mancanegara.

Visi yang disebutkan diatas adalah cita-cita dan idealisme yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan menjadi komitmen dan tantangan bagi segenap Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan;
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
3. Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
5. Meningkatkan peran ekosistem pendidikan;
6. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan.

Indikator Kinerja Utama tahun 2023 sesuai Renstra Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1. TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
			Target	Capaian
Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,09	13,33
	Terjaminnya Akses dan Layanan Serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,19	11,45

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan target untuk masing- masing sasaran yang harus dicapai, Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) 2023 memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator sasaran. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (PK) dipresentasikan dan tertuang didalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, dimana di dalamnya memuat indikator kinerja serta terdapat sasaran strategis maupun indikator kinerja termasuk target capaian untuk masing-masing indikator kinerja. Berikut ini program kegiatan yang tertuang di dalam Indikator Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2023, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

TABEL 2.2. INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
<b>SASARAN STRATEGIS</b>										
1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	1	Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN	Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	N/A	N/A	100	N/A	100	Persentase
		2	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1	Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya kapasitas PTK sekolah menengah dalam penanganan peserta didik penyandang disabilitas	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		2		Tersedianya dokumen regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif	100	N/A	N/A	N/A	100	Persentase
		3		Tersedianya satuan pendidikan negeri yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		4		Peserta didik inklusi mengikuti Kurikulum yang telah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik, jam belajar sama dengan peserta didik reguler	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		5		Tersedianya pusat sumber layanan sesuai ragam disabilitas (berbasis satuan pendidikan dan yayasan yang peduli disabilitas)	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
		6		Tersosialisasikan pendidikan inklusi kepada satuan pendidikan (warga sekolah termasuk peserta didik)	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		7		Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		8		Peserta didik disabilitas terfasilitasi bersekolah di SLB	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		9		Tersosialisasikannya kebijakan/peraturan daerah atau pun peraturan gubernur terbaru dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang inklusif kepada sekolah	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		10		Tersedianya dokumen pedoman penyelenggaraan sekolah inklusi	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		11		Peserta didik disabilitas mampu menamatkan pendidikan wajib 12 tahun	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		12		Penyandang Disabilitas terfasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
		13		Tersedianya PAUD Holistik Integratif yang melakukan deteksi dan intervensi dini potensi disabilitas intelektual	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		14		Tersedianya dokumen Penyelesaian kajian unit layanan disabilitas bidang pendidikan	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		15		Tersedianya lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas yang dibina	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
3	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1	Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan	Terpenuhinya pelayanan minimal bidang pendidikan bagi penduduk usia sekolah dari persentil 1 s.d. 5 pada desil 1 Data P3KE	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
4	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	1	Pemantauan Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di PAUD melalui PIKUMBANG	30% Peserta Didik di PAUD Negeri di Provinsi DKI Jakarta dilakukan PIKUMBANG	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase
		2	Penguatan rancangan edukasi TBC HIV dan	Terlaksananya kaji ulang materi pembelajaran (RPP)	N/A	N/A	100	N/A	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
			Edukasi Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker)	tentang TBC-HIV (Penyakit Menular) dan Penyakit Tidak Menular : hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas,kanker) serta Terlaksananya edukasi TBC HIV (Penyakit Menular) dan Penyakit Tidak Menular: hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) bagi peserta didik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, PKBM dan Madrasah - Pondok Pesantren						
		3	Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan	Terlaksananya skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) pada warga sekolah	N/A	N/A	100	N/A	100	Persentase
		4	Perujukan warga sekolah terduga/ berisiko TBC-HIV	Terlaksananya perujukan warga sekolah terduga/berisiko TBC-HIV	N/A	N/A	100	N/A	100	Persentase
5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	1	Optimalisasi Pemanfaatan Buku Rapor Kesehatanku dalam memantau Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Tersedianya 20% Buku Rapor Kesehatanku untuk Peserta Didik (SD Negeri, SMP Negeri, dan SLB Negeri) DKI Jakarta	N/A	100	N/A	N/A	100	Persentase
		2	Pemantauan Minum Tablet Tambah Darah untuk Siswi SMP dan SMA	100% Siswi SMP dan SMA meminum Tablet Tambah Darah	N/A	100	N/A	N/A	100	Persentase
6	Persentase penyelesaian rencana	1	Kampanye Pentingnya Pendidikan Anak Usia	1. Terlaksananya kampanye layanan PAUD 1 tahun sebelum	100	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
	aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan Pendidikan		Dini (PAUD) 1 Tahun sebelum SD	SD secara berjenjang di 5 wilayah kota Administrasi dan 1 kabupaten 2. meningkatnya angka kesiapan masuk sekolah kondisi thn 2022 = 78% menjadi 80%						
2		Evaluasi Implementasi pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu	Tersedianya laporan evaluasi Implementasi pemberian KJMU kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu: Data yang dievaluasi - Jenis dan jumlah prodi - lulusan yang bekerja - lulusan yang mendapatkan beasiswa pendidikan S 2 dalam dan luar negeri	N/A	N/A	100	100	100	Persentase	
3		Peningkatan kualitas pemantauan penggunaan dana penerimaan KJP Plus	1. Seluruh penerima baru tahap I dan tahap II memperoleh KJP Plus Tahap I dan Tahap II Tahun 2023 tepat waktu. 2. Pemegang KJP Plus dapat menggunakan Digital Payment melalui aplikasi jakone mobile 3. tersedianya pendataan penggunaan dana KJP Plus	N/A	100	100	100	100	Persentase	
4		Pemenuhan Kewajiban Pengembang diluar	Tersedianya data Pengembang dan lokasi kegiatan yang memiliki	100	100	N/A	N/A	100	Persentase	
			Lahan Perencanaan untuk Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan	kewajiban pada Sektor Pendidikan						
		5	Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja	Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan IDUKA	100	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
			Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)	(Industri, Dunia Usaha dan Kerja) dan Perguruan Tinggi						
		6	Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di semua jenjang	Meningkatkan jumlah pendidik profesional melalui program peningkatan kompetensi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik	N/A	100	100	100	100	Persentase
		7	Pelaksanaan Program Jakarta Sekolah Komunitas	1. Terlaksananya Program Jakarta Sekolah Komunitas 2. Tersedianya data Sekolah Komunitas 3. Terevaluasinya program Jakarta Sekolah Komunitas						Persentase
7	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	100	N/A	100	N/A	100	Persentase
		2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	Persentase
		3	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	100	Persentase
		4	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	100	N/A	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
<b>SASARAN KHUSUS</b>										
8	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah target pendidik yang mengikuti pelatihan di P2KPTK2	N/A	100	100	100	100	Persentase
9	Meningkatkannya akses Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik dan EMIS	Jumlah peserta didik PAUD yang terdaftar di DAPODIK dibagi jumlah seluruh peserta didik PAUD	N/A	N/A	N/A	98,06	98,06	Persentase
10	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	Rerata persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik	N/A	N/A	N/A	33	33	Persentase
11	Berkurangnya keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berwirausaha	1	Persentase Keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha	Jumlah lulusan SMK yang diterima di dunia kerja dan berwirausaha dibagi jumlah seluruh lulusan SMK dikurangi jumlah yang melanjutkan pendidikan	35	45	55	65	65	Persentase
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Jumlah realisasi hari pelaksanaan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	10	10	20	Hari
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%, Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100	100	100	100	100	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang	1	Opini laporan keuangan	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
	transparan dan akuntabel			laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))						
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah,  b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi,  c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfofik,  d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang,	100	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan, b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan, c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan, d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan),						
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	N/A	N/A	N/A	82	82	Predikat
17	Peningkatan pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / teRp.roses pada hari yang sama, Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office", Diperlukan penentuan	N/A	100	100	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				penanggung jawab akun E office di setiap SKPD, Jumlah surat belum terdisposisi / teRp.roses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut,						
18	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Formula pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Sumber data: Daftar Data Daerah (Portal Data)	100	100	100	100	100	Persentase
19	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	1. Persiapan 10% a. Bobot 5% : PD/UKPD menyusun SK Tim/Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5% : PD/UKPD menyusun jadwal inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% Bobot 75% : PD/UKPD menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5% : PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5% : PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5% : PD/UKPD membuat surat	N/A	10	55	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				pernyataan Tanggung Jawab Mutrak (SPTJM)						
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Definisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah, Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	80	80	Persentase
21	Terimplementasinya pengembangan		Persentase Implementasi	{(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat)/(Jumlah data	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
	kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam pelajaran pertahun		Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 bulan Desember Triwulan 4}} x 100%						
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office, Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office, Jumlah perbal yang terRp.roses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD,	N/A	N/A	50	50	100	Persentase
23	Implementasi Penerapan Manajemen resiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Tersajinya dokumen dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Resiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :  Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Resiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal.  Triwulan III: 1. Dokumen formulir Penetapan Penanganan Konteks Manajemen Resiko; 2. Dokumen formulir profil dan peta resiko	N/A	40	80	100	100	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				Triwulan IV : Dokumen formulir Penanganan Resiko  Sumber data : Hasil Verifikasi Inspektorat						
24	Tercapainya target kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Bobot masing-masing variabel Aspek implementasi sebagai berikut : Bp : 9,7% BK : 18,2% Bckk : 43,5 % BE : 28,6 %  Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efesiensi	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
<b>SASARAN OPERASIONAL</b>										
25	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
27	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai diperoleh dari sistem Jak Survei	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
28	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

### C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPD

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, terdapat 4 tujuan dan 17 sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang terkait Dinas Pendidikan sebagai berikut:

TABEL 2.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat.	Indeks Dimensi Pendidikan	12,12	12,14	12,16	12,18	12,20	12,20

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator yang akan digunakan dimana definisi operasional dari indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun; Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

#### 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

TABEL 3.1. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Indikator Kinerja Utama</b>					
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,09	13,33	101,83%
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,33	11,45	101,06%

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

#### a. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada tahun 2023 target Harapan Lama Sekolah adalah 13,09 tahun dengan realisasi 13,33 tahun sehingga capaian di tahun 2023 adalah 101,83%.

Faktor pendorong keberhasilan capaian yaitu:

- 1) Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU.
- 2) Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
- 3) Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.
- 4) Pemberian bantuan sosial dana pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa.

b. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2023, target Rata-rata Lama Sekolah adalah 11,33 tahun, dengan realisasi 11,45 tahun, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 101,06%. Sama seperti keberhasilan Harapan Lama Sekolah, faktor pendorong keberhasilan capaian Rata-rata Lama Sekolah yaitu :

- 1) Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
- 2) Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.494.541.170.405 dan realisasi Rp8.871.086.830.994 atau 93,43% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
  - (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp3.596.982.727.153 dan realisasi Rp3.188.857.944.965 atau 88,65%.
  - (2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp2.002.355.624.552 dan realisasi Rp1.932.828.712.824 atau 96,53%.
  - (3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan anggaran Rp1.618.699.168.375 dan realisasi Rp1.566.749.797.744 atau 96,79%.
  - (4) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp1.728.066.056.780 dan realisasi Rp1.670.887.993.956 atau 96,69%.
  - (5) Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp80.620.366.516 dan realisasi Rp75.258.163.675 atau 93,35%.
  - (6) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp178.066.052.015 dan realisasi Rp159.831.432.358 atau 89,76%.
  - (7) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp289.751.175.014 dan realisasi Rp276.672.785.472 atau 95,49%.

- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp7.467.640.616.638 dan realisasi Rp7.334.062.221.644 atau 98,21% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
- (1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp7.336.926.257.321 dan realisasi Rp7.217.988.995.702 atau 98,38%,
  - (2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp18.471.527.060 dan realisasi Rp17.475.387.638 atau 94,61%,
  - (3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp45.541.656.521 dan realisasi Rp34.770.632.255 atau 76,35%,
  - (4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp1.963.902.989 dan realisasi Rp1.841.850.356 atau 93,79%,
  - (5) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp4.503.316.353 dan realisasi Rp3.464.673.332 atau 76,94%,
  - (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp59.612.873.919 dan realisasi Rp57.901.599.886 atau 97,13%,
  - (7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp621.082.475 dan realisasi Rp619.082.475 atau 99,68%.

Untuk menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah, Dinas Pendidikan juga melakukan inovasi yaitu Pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) yang diberikan kepada Peserta Didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, dan Sekolah Net Zero Carbon sebagai pioneer gerakan besar menuju bangunan emisi rendah pertama atau bahkan mencapai neraca zero emisi yang menjadi percontohan bangunan masa depan untuk generasi muda yang berkonsep green building dan nyaman bagi peserta didik.

Keberhasilan pencapaian IKU Dinas Pendidikan, terutama pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi pengeluaran. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta dan capaian Nasional dari tahun 2018 hingga 2023 sebagai berikut:

TABEL 3.2. CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
TAHUN 2018-2023

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DKI JAKARTA	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65	82,46
INDONESIA	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, BPS

## 2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

TABEL 3.3. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	100	100	100%
2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak	Persen	100	100	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Penyandang Disabilitas				
3	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persen	100	100	100%
4	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Persen	100	100	100%
5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	Persen	100	100	100%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan Pendidikan	Persen	100	100	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	100	100	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	Persen	100	101,19	101,19%
9	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik dan EMIS	Persen	98,06	98,76	100,71%
10	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	Persen	33	76,30	231,21%
11	Persentase Keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha	Persen	65	83,07	127,80%
12	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Hari	20	20	100%
13	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	100	100%
14	Opini laporan keuangan	Persen	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
15	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persen	100	100	100%
16	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Persen	82	83,55	101,89%
17	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persen	100	100	100%
18	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persen	100	100	100%
19	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada	Persen	100	91,78	91,78%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD				
20	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	72	90%
21	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen	100	91,78	91,78%
22	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100%
23	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%
24	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	77,34	108,93%
<b>Sasaran Operasional</b>					
25	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%
26	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,05	99,05%
27	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	88,5	86,76	98,03%
28	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator, sebagai berikut :

- a. Capaian indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta target 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian di tahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan renaksi tersebut yaitu :
  - 1) Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN  
Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022
  - 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023  
Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023
  
- b. Capaian indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas target 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan renaksi tersebut yaitu :
  - 1) Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas
  - 2) Meningkatnya kapasitas PTK sekolah menengah dalam penanganan peserta didik penyandang disabilitas;
  - 3) Tersedianya dokumen regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif;
  - 4) Tersedianya satuan pendidikan negeri yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
  - 5) Peserta didik inklusi mengikuti Kurikulum yang telah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik, jam belajar sama dengan peserta didik reguler;
  - 6) Tersedianya pusat sumber layanan sesuai ragam disabilitas (berbasis satuan pendidikan dan yayasan yang peduli disabilitas);
  - 7) Tersosialisasikan pendidikan inklusi kepada satuan pendidikan (warga sekolah termasuk peserta didik);

- 8) Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi;
  - 9) Peserta didik disabilitas terfasilitasi bersekolah di SLB;
  - 10) Tersosialisasikannya kebijakan/peraturan daerah atau pun peraturan gubernur terbaru dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang inklusif kepada sekolah;
  - 11) Tersedianya dokumen pedoman penyelenggaraan sekolah inklusi;
  - 12) Peserta didik disabilitas mampu menamatkan pendidikan wajib 12 tahun;
  - 13) Penyandang Disabilitas terfasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
  - 14) Tersedianya PAUD Holistik Integratif yang melakukan deteksi dan intervensi dini potensi disabilitas intelektual;
  - 15) Tersedianya dokumen Penyelesaian kajian unit layanan disabilitas bidang pendidikan; dan
  - 16) Tersedianya lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas yang dibina.
- c. Capaian indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan target 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan rencana aksi tersebut yaitu Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan. Terpenuhinya pelayanan minimal bidang pendidikan bagi penduduk usia sekolah dari persentil 1 s.d. 5 pada desil 1 Data P3KE.
- d. Capaian indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi target 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan rencana aksi tersebut yaitu :
- 1) Pemantauan Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di PAUD melalui PIKUMBANG sudah melebihi 30% Peserta Didik di PAUD Negeri di Provinsi DKI Jakarta dilakukan PIKUMBANG;

- 2) Penguatan rancangan edukasi TBC HIV dan Edukasi Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) dengan terlaksananya kaji ulang materi pembelajaran (RPP) tentang TBC-HIV (Penyakit Menular) dan Penyakit Tidak Menular : hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) serta Terlaksananya edukasi TBC HIV (Penyakit Menular) dan Penyakit Tidak Menular: hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) bagi peserta didik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, PKBM dan Madrasah - Pondok Pesantren;
  - 3) Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan dengan terlaksananya skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) pada warga sekolah; dan
  - 4) Perujukan warga sekolah terduga/berisiko TBC-HIV dengan terlaksananya perujukan warga sekolah terduga/berisiko TBC-HIV.
- e. Capaian indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting target 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan rencana aksi tersebut yaitu :
- 1) Optimalisasi Pemanfaatan Buku Rapor Kesehatanku dalam memantau Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja  
Tersedianya 20% Buku Rapor Kesehatanku untuk Peserta Didik (SD Negeri, SMP Negeri, dan SLB Negeri) DKI Jakarta; dan
  - 2) Pemantauan Minum Tablet Tambah Darah untuk Siswi SMP dan SMA  
100% Siswi SMP dan SMA meminum Tablet Tambah Darah.
- f. Capaian indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan Pendidikan target 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan rencana aksi tersebut yaitu :
- 1) Kampanye Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Tahun sebelum SD

- 2) Evaluasi Implementasi pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu
  - 3) Peningkatan kualitas pemantauan penggunaan dana penerimaan KJP Plus
  - 4) Pemenuhan Kewajiban Pengembang diluar Lahan Perencanaan untuk Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan
  - 5) Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK melalui Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha (BMW)
  - 6) Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di semua jenjang
  - 7) Pelaksanaan Program Jakarta Sekolah Komunitas
- g. Capaian indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) target 100%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan renaksi tersebut yaitu :
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024  
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024
  - 2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah  
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah
  - 3) Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022  
Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu
  - 4) Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah  
Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
- h. Capaian indikator persentase pendidik yang mengikuti pelatihan  
Pada tahun 2023, target persentase pendidik yang mengikuti pelatihan adalah 100%, dengan realisasi 101,19%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 101,19%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan yaitu pelaksanaan pelatihan yang dapat dilaksanakan secara hybrid, baik daring ataupun luring. Untuk kegiatan

luring juga disediakan anggaran pelatihan untuk peningkatan kompetensi sehingga melampaui target.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pagu Rp. 361,013,722,780 dan realisasi Rp. 361,011,070,000 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,99% melalui anggaran pelatihan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat didalam kegiatan :

- 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran Rp. 1,284,000,000 dan realisasi Rp. 1,284,000,000 atau 100%,
- 2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi dengan anggaran Rp. 359,729,722,780 dan realisasi Rp. 359,727,070,000 atau 99,99%.

Disamping didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan, Dinas Pendidikan juga melakukan sebuah inovasi untuk kegiatan pelatihan dengan mengembangkan sistem Jaklat yang merupakan sebuah sistem pengembangan profesional Guru DKI Jakarta.

- i. Capaian indikator Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik dan EMIS

Pada tahun 2023, target Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik dan EMIS adalah 98,06%, dengan realisasi 98,76%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100,71%. Faktor pendorong keberhasilan capaian Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik yaitu semakin meningkatnya kesadaran pengelola PAUD dalam perizinan sehingga semakin banyaknya jumlah PAUD resmi yang terdaftar di dalam sistem Dapodik dan EMIS Kementerian Agama.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.494.541.170.405 dan realisasi Rp8.871.086.830.994, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 93,43%, yang terdapat dalam

kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp289.751.175.014 dan realisasi Rp276.672.785.472 atau 95,49%.

j. Capaian indikator Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer Pada tahun 2023, target Persentase Asesmen Kompetensi Minimum adalah 33% dengan realisasi 76,30%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 231,21%. Faktor pendorong keberhasilan adalah semakin banyaknya satuan pendidikan yang telah mencapai angka minimum pada kategori literasi, numerasi dan karakter. Kedepannya juga perlu semakin ditingkatkan agar semakin bertambah banyak satuan pendidikan yang mencapai angka minimum pada kategori literasi, numerasi dan karakter.

k. Capaian indikator Persentase Keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha Pada tahun 2023, target Tingkat Keterserapan Kerja lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha adalah 65% dengan realisasi 83,07%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 127,80%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Tingkat Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri yaitu tersedianya dukungan anggaran bagi kegiatan sertifikasi peserta didik dan semakin banyak peserta didik yang mengikuti sertifikasi, sehingga setelah lulus dari satuan pendidikan sertifikasi tersebut bisa digunakan pada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

Adapun program/ kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.494.541.170.405 dan realisasi Rp8.871.086.830.994, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 93,43%, yang terdapat dalam kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp1.728.066.056.780 dan realisasi Rp1.670.887.993.956 atau 96,69%.

l. Capaian indikator Jumlah Hari Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV

Pada tahun 2023, target Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV adalah 20 Hari dengan realisasi 20 Hari,

sehingga tingkat ketercapaian 100%. Faktor pendorong adalah tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi bersama antara Bidang Dinas, Suku Dinas, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.494.541.170.405 dan realisasi Rp8.871.086.830.994, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 93,43%.

m. Capaian Persentase Pemanfaatan E-Order

Pada tahun 2023, target indikator Persentase Pemanfaatan e-Order adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Pada tahun 2022 capaian hanya 39%, faktor penghambat keberhasilan capaian indikator persentase pemanfaatan e-order dikarenakan perhitungan jumlah realisasi SP2D rekening makan minum juga memperhitungkan anggaran makan minum di satuan pendidikan, sedangkan pada satuan pendidikan pencairan dana BOP dilakukan per triwulan, sehingga realisasi makan minum tidak bisa menggunakan sistem e-order yang harus dibayarkan maksimal 3 hari kerja. Berdasarkan hasil diskui dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) untuk Dinas Pendidikan dikecualikan karena penggunaan e-order tidak bisa dilakukan di satuan pendidikan.

n. Capaian indikator Opini laporan keuangan

Pada tahun 2023, target indikator Opini laporan keuangan daerah adalah 3 (WTP) dengan realisasi 3 (WTP), sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Opini laporan keuangan daerah adalah penyajian data dan informasi dalam laporan keuangan dan laporan aset Dinas Pendidikan yang wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan standar pengelolaan barang milik daerah.

o. Capaian indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program

Pada tahun 2023, target indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tersusunnya paparan dan terpublikasinya program unggulan dan program umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- p. Capaian indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023  
Pada tahun 2023, target Predikat SAKIP Perangkat Daerah adalah 82% dengan realisasi 83,55%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 101,89%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Tingkat Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu semakin baiknya pengimplementasian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan dokumen pendukung.
- q. Capaian indikator Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif  
Pada tahun 2023, target Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif yaitu adanya SDM yang sesuai dengan kompetensinya sehingga kearsipan Dinas Pendidikan tertata dengan baik, selain SDM juga didukung dengan sistem arsip secara digital.
- r. Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  
Pada tahun 2023, target Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Tahun 2023

adanya UPT Pusdatin Pendidikan yang salah satu tugasnya untuk mengelola data pendidikan.

- s. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD

Pada tahun 2023, target Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD adalah 100% dengan realisasi 91,78%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 91,78%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD tahun 2023 yaitu banyak faktor baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus barang, fasilitas penunjang bagi pengurus barang, koordinasi dan komunikasi antara sekolah, UPT, Dinas dan BPAD serta birokrasi.

- t. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Pada tahun 2023, target Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri adalah 80% dengan realisasi 72%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 90%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Tahun 2023 yaitu realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) pengadaan barang/jasa dan belanja modal di satuan pendidikan sudah diatur dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2022 yaitu dengan sistem daring menggunakan SipLah, sementara SipLah belum terintegrasi dengan bigbox Kemendagri RI.

- u. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Pada tahun 2023, target Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun adalah 100% dengan realisasi 91,78%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 91,78%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun tahun 2023 yaitu jumlah pegawai yang cukup banyak menjadi salah satu faktor penyebab ketidaktercaian target indikator ini.

v. Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

Pada tahun 2023, target Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan tahun 2023 yaitu adanya SDM yang menangani penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.

w. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Pada tahun 2023, target Predikat SAKIP Perangkat Daerah adalah 82% dengan realisasi 83,55%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 101,89%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Tingkat Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BPKP dalam penyusunan Manajemen Resiko sampai Penangan resiko.

x. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

Pada tahun 2023, target Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko tahun 2023 yaitu perencanaan dan pelaporan telah didukung oleh sistem informasi sehingga bersifat transparan dan akuntabel, serta penyerapan anggaran setiap program yang di atas 91%. Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp9.494.541.170.405 dan realisasi Rp8.871.086.830.994 atau 93,43% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
  - (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp3.596.982.727.153 dan realisasi Rp3.188.857.944.965 atau 88,65%.
  - (2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp2.002.355.624.552 dan realisasi Rp1.932.828.712.824 atau 96,53%.
  - (3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan anggaran Rp1.618.699.168.375 dan realisasi Rp1.566.749.797.744 atau 96,79%.
  - (4) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp1.728.066.056.780 dan realisasi Rp1.670.887.993.956 atau 96,69%.
  - (5) Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp80.620.366.516 dan realisasi Rp75.258.163.675 atau 93,35%.
  - (6) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp178.066.052.015 dan realisasi Rp159.831.432.358 atau 89,76%.
  - (7) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp289.751.175.014 dan realisasi Rp276.672.785.472 atau 95,49%.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp7.467.640.616.638 dan realisasi Rp7.334.062.221.644 atau 98,21% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
  - (1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp7.336.926.257.321 dan realisasi Rp7.217.988.995.702 atau 98,38%.
  - (2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp18.471.527.060 dan realisasi Rp17.475.387.638 atau 94,61%.
  - (3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp45.541.656.521 dan realisasi Rp34.770.632.255 atau 76,35%.

- (4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp1.963.902.989 dan realisasi Rp1.841.850.356 atau 93,79%,
- (5) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp4.503.316.353 dan realisasi Rp3.464.673.332 atau 76,94%,
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp59.612.873.919 dan realisasi Rp57.901.599.886 atau 97,13%,
- (7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp621.082.475 dan realisasi Rp619.082.475 atau 99,68%.

y. Capaian indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Pada tahun 2023, target indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur yaitu terselesaikannya seluruh Tindak Lanjut Arahan Gubernur bagi Dinas Pendidikan.

z. Capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Pada tahun 2023, target indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah 100% dengan realisasi 99,05%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 99,05%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu terselesaikan dengan tuntas hampir seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Pendidikan hanya faktor waktu penyelesaian pengaduan belum sesuai aturan kedepannya Dinas Pendidikan akan segera merespon setiap pengaduan masyarakat.

aa. Capaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2023, target indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah 88,5% dengan realisasi 86,76%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 86,76%. Dinas Pendidikan akan meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat terus meningkat.

bb. Capaian indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Pada tahun 2023, target indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2023 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu semakin banyaknya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sesuai target.

## B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

TABEL 3.4. INDIKATOR PROGRAM KERJA DALAM RENSTRA DINAS PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase (%)	30	83,07
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase (%)	100	72,37
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase (%)	100	98,83
		Persentase guru profesional	Persentase (%)	87,4	87,49
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase (%)	72,37	82,84
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	68,75	81,95
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	61,33	65,24
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase (%)	100	72,5

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase (%)	100	66,87
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Index	4	4

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (Renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2022 dan Renstra tahun 2023 - 2026 pada tabel berikut:

No	Sasaran	IKU	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,40	80,76	80,40	80,77						
2		Harapan Lama Sekolah	Nilai					13	13,07	13,07	13,08	13,09	13,33
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	Indeks	3,150	3,171	3,200	3,171						
4	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Persentase	11,32	11,11	11,55	11,17	11,19	11,20	11,20	11,31	11,33	11,45
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen			100	100	91	91,5	91	91,02		

Pada Tahun 2019 hingga 2020 Dinas Pendidikan mengampu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Skor EKPPD sesuai tujuan SKPD pada Renstra Tahun 2023-2026. Pada realisasi indikator IPM tahun 2019 hingga 2020 terus meningkat tiap tahunnya dan selalu mencapai target dari yang telah ditetapkan. Begitupun dengan indikator skor EKPPD, capaian Tahun 2019 dan 2020 menggunakan angka realisasi tahun 2018 karena angka capaian belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri.

Akan tetapi pada tahun 2021, berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan yang juga sesuai dengan arahan Asisten Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan tidak lagi mengampu Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan pada indikator tersebut terdiri lebih dari satu komponen pembentuk, sehingga tidak saja diampu oleh Dinas Pendidikan tetapi juga SKPD lain. Oleh sebab itu pada tahun 2021 Dinas Pendidikan mengampu indikator tujuan SKPD yaitu Harapan Lama Sekolah yang menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi 13,08 tahun dari target tahun 2022 yaitu 13,07 tahun, sedangkan pada indikator tujuan skor EKPPD juga tidak digunakan lagi.

Pada Indikator Kinerja Rata-rata lama sekolah, realisasi tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, meskipun bila dibandingkan dengan target tahunan 2019 dan 2020 realisasi berada dibawah target, serta pada tahun 2021, 2022 dan 2023 realisasi RLS melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu juga pada indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi tahun 2020 hingga 2023 tercapai melebihi target yang ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi Tahun 2023	Target			Kondisi Akhir 2026
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	80,97	72,50	100	100	100	100
2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	38,65	66,87	100	100	100	100

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	Realisasi Tahun 2023	Target			Kondisi Akhir 2026
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	22,54	83,07	35	45	55	55
4	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	36,38	72,37	100	100	100	100
5	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99,1	98,83	100	100	100	100
6	Persentase guru profesional	Persentase	86,3	87,49	88,5	89,6	90,7	90,7
7	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	72,18	82,84	72,56	72,75	72,94	72,94
8	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	67,58	81,95	69,92	71,08	72,25	72,25
9	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	60,17	65,24	62,50	63,67	64,83	64,83

- a. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, dengan target tahunan sebesar 30 serta capaiannya 83,07 (tercapai).
- b. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 72,37 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,63 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas dan kesadaran orang tua, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 6 tahun yang sudah bersekolah di jenjang SD.
- c. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 98,83 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 1,17 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 7 tahun yang sudah bersekolah di PAUD, dan usia 15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang menengah atas.
- d. Persentase guru profesional, dengan Target Tahunan sebesar 87,40 serta capaiannya 87,49 (tercapai).
- e. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A, dengan target tahunan sebesar 72,37 serta capaiannya 82,84 (tercapai).
- f. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 68,75 serta capaiannya 81,95 (tercapai).

- g. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 61,33 serta capaiannya 65,24 (tercapai).
  - h. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 72,50 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,50 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat anak usia 16 tahun yang masih bersekolah di menengah pertama dan usia 18 tahun yang sudah lulus menengah atas.
  - i. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 66,87 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 33,13 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar.
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
- Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta juga dapat diperbandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi lain dengan hasil sebagai berikut:
- a. Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah tahun 2023, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 13,33 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 13,15 tahun, Ini berarti Harapan Lama Sekolah penduduk Jakarta mengenyam pendidikan formal adalah 13,33 tahun atau setara Diploma 1, sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk secara nasional untuk mengenyam pendidikan adalah 13,15 tahun atau juga setara dengan Diploma 1. Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta meningkat 0,25% dari capaian tahun 2022 yang sebesar 13,08 tahun, Faktor pendorong pencapaian indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU, tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan, perluasan pendidikan

inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.6. PERBANDINGAN CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2022 DAN 2023

Provinsi	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
	2022	2023
DKI JAKARTA	13,08	13,33
INDONESIA	13,10	13,15

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2023, BPS

- b. Pada Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 11,45 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 8,77 tahun. Ini berarti penduduk Jakarta rata-rata telah menamatkan pendidikan formal hingga kelas 11 jenjang Sekolah Menengah, serta mendekati target Pemerintah terkait Wajib Belajar 12 Tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah secara nasional adalah 8,77 tahun atau rata-rata penduduk secara nasional baru menamatkan pendidikan formal hingga kelas 8 jenjang Sekolah Menengah. Jelas bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta berada diatas capaian nasional, sekaligus menjadi provinsi dengan peringkat pertama yang capaiannya tertinggi dibandingkan provinsi lain. Hasil capaian Rata-rata Lama Sekolah menurut Provinsi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.7. PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2022 DAN 2023

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
	2022	2023
DKI JAKARTA	11,31	11,45
INDONESIA	8,69	8,77

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023, BPS

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan terdapat 9 (sembilan) Indikator Program sebagai berikut:

- a. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, dengan target tahunan sebesar 30 serta capaiannya 83,07 (tercapai).

- b. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 72,37 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,63 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas dan kesadaran orang tua, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 6 tahun yang sudah bersekolah di jenjang SD.
- c. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 98,83 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 1,17 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 7 tahun yang sudah bersekolah di PAUD, dan usia 15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang menengah atas.
- d. Persentase guru profesional, dengan Target Tahunan sebesar 87,40 serta capaiannya 87,49 (tercapai).
- e. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A, dengan target tahunan sebesar 72,37 serta capaiannya 82,84 (tercapai).
- f. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 68,75 serta capaiannya 81,95 (tercapai).
- g. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 61,33 serta capaiannya 65,24 (tercapai).
- h. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 72,50 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 27,50 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat anak usia 16 tahun yang masih bersekolah di menengah pertama dan usia 18 tahun yang sudah lulus menengah atas.
- i. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 66,87 (tidak

tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 33,13 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, pernikahan anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar.

### C. REALISASI ANGGARAN

#### 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

TABEL 3.8. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,33	101,83 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.467.640.616.638	7.334.062.221.644	98,21%
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,45	101,06 %	Program Pengelolaan Pendidikan	9.494.541.170.405	8.871.086.830.994	93,43%
							Jumlah	16.962.181.787.043	16.205.149.052.638	95,54%

Sasaran strategis Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas Bagi Semua dengan indikator sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki target di tahun 2023 sebesar 13,07 dengan realisasi 13,08 atau 100,08% (tercapai). Adapun sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Disegala Jenjang Satuan Pendidikan secara Tuntas dan Berkelanjutan dengan indikator sasaran Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki target di tahun 2023 sebesar 11,20 dengan realisasi 11,31 atau 100,99% (tercapai).

## 2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program

TABEL 3.9. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.494.541.170.405	8.871.086.830.994	93,43%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.467.640.616.638	7.334.062.221.644	98,21%
<b>Jumlah</b>	<b>16.962.181.787.043</b>	<b>16.205.149.052.638</b>	<b>95,54%</b>

## 3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

TABEL 3.10. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023

SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
DINAS PENDIDIKAN	11.209.241.943.853	10.964.124.630.865	97,81%
SUDINDIK KAB - KEP. SERIBU	21.238.659.655	20.713.389.724	97,53%
SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKBAR	160.524.588.786	150.720.081.918	93,89%
SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKPUS	62.068.244.351	60.343.295.726	97,22%
SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKSEL	160.752.540.355	157.826.428.499	98,18%
SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKTIM	239.473.121.614	233.555.832.805	97,53%
SUDINDIK WIL 1 KOTA - JAKUT	75.365.576.402	70.607.487.088	93,69%
SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKBAR	126.986.688.220	126.145.852.504	99,34%
SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKPUS	106.430.503.923	95.178.975.879	89,43%
SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKSEL	164.149.167.979	149.623.407.146	91,15%
SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKTIM	212.353.143.127	206.905.247.376	97,43%
SUDINDIK WIL 2 KOTA - JAKUT	105.785.868.895	103.807.460.376	98,13%
PUSDATINDIK	4.989.558.814	4.830.014.154	96,80%
P4 - JAKBAR	7.429.840.184	7.309.765.673	98,38%
P4 - JAKPUS	9.833.519.621	9.735.920.014	99,01%
P4 - JAKSEL	8.552.736.520	8.397.329.975	98,18%
P4 - JAKTIM	11.313.327.148	11.193.675.668	98,94%
P4 - JAKUT & KEP.SERIBU	8.392.800.432	8.315.382.355	99,08%
P4OP	3.559.153.622.307	3.488.066.855.477	98,00%
UP PRASARDIK	651.815.186.149	274.514.333.365	42,12%
SMANU MH THAMRIN	12.142.235.738	11.610.872.799	95,62%
SMKN 13 JAKARTA	2.775.220.144	2.736.920.025	98,62%
SMKN 20 JAKARTA	1.856.303.527	1.843.536.996	99,31%
SMKN 24 JAKARTA	4.253.956.563	4.092.122.554	96,20%
SMKN 26 JAKARTA	6.659.582.289	6.441.381.630	96,72%
SMKN 27 JAKARTA	5.843.613.911	5.667.388.883	96,98%
SMKN 32 JAKARTA	2.950.442.496	2.865.658.916	97,13%
SMKN 33 JAKARTA	2.013.561.941	1.742.693.693	86,55%
SMKN 36 JAKARTA	4.150.447.092	3.830.569.905	92,29%

SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
SMKN 37 JAKARTA	3.528.350.061	3.352.212.482	95,01%
SMKN 51 JAKARTA	2.540.333.889	2.488.315.263	97,95%
SMKN 57 JAKARTA	5.358.554.198	4.667.648.629	87,11%
SMKN 63 JAKARTA	2.258.546.859	1.894.544.276	83,88%
<b>Grand Total</b>	<b>16.962.181.787.043</b>	<b>16.205.149.232.638</b>	<b>95,54%</b>

Dari hasil capaian tahun 2023, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan budaya kerja di Dinas Pendidikan yang dibuktikan dengan integritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif dan berkeadilan. Integritas keselarasan antara target dengan realisasi seperti tercapainya target Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan dapat dirasakan bagi seluruh warga Jakarta. Membangun kerjasama dan kemitraan yang efektif, baik antar SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat (BPMP Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta) dan dengan stakeholder pendidikan seperti Perguruan Tinggi, asosiasi profesi guru, Lembaga Pemerhati Pendidikan. Pekerjaan yang dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja yang dilaporkan setiap triwulan pada sistem e-SAKIP dan adanya Telaah DPA dan monitoring penyerapan anggaran yang membuat penyerapan anggaran tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Munculnya gagasan pembaharuan untuk meningkatkan mutu layanan seperti inovasi sistem pelatihan Jaklat, sekolah *net carbon zero* dan pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan berkeadilan untuk memastikan pendidikan dapat dirasakan secara merata bagi warga Jakarta melalui adanya jalur afirmasi yang dikhususkan bagi peserta didik dengan ekonomi menengah kebawah yang mendapatkan KJP Plus.

# BAB IV

## PENUTUP

---

### A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan sudah menyajikan seluruh target indikator dan capaian kinerja, dan sudah di selaraskan antara dokumen renstra dan perjanjian kinerja;
2. Dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Dinas Pendidikan telah mencapai target masing-masing sebesar 13,33 dari 13,09 atau 101,83% dan sebesar 11,45 dari 11,33 atau 101,06%.
3. Dari 28 Indikator Kinerja, ada 5 indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target yaitu :
  - a. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD;
  - b. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
  - c. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun;

- d. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - e. Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp16.205.149.232.638 dari anggaran Rp16.962.181.787.043 atau 95.54%.

## B. SARAN

Demi menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu perencanaan yang baik sehingga penyerapan dilakukan secara optimal dan kualitas dapat tercapai;
2. Memaksimalkan segala pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan membuat alternatif pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih efektifitas dan efisiensi berdasarkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Purwosusilo  
NIP. 196707241997031005

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

  
**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAEFULOH HIDAYAT  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO  
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  HERU BUDI HARTONO	PIHAK PERTAMA, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  SYAEFULOH HIDAYAT NIP 197612221998111001
--	--

## INOVASI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023



Aplikasi Jaklat (Jakarta Pelatihan) bagi Pendidik



Sekolah Net Zero Carbon



Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS)

## PRESTASI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Surat Pengakuan Greenship bagi Sekolah Net Zero Carbon  
dari Green Building Council Indonesia



### Prestasi Peserta Didik

	SD	SMP	SMA	SMK
<b>GOLD</b> 	1 Medali	6 Medali	10 Medali	9 Medali
<b>SILVER</b> 	3 Medali	12 Medali	10 Medali	13 Medali
<b>BRONZE</b> 	3 Medali	12 Medali	22 Medali	5 Medali

## Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2023

